

## **KOORDINASI LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**Septi Dwi Wulandari<sup>1</sup>, Rahmat Salam<sup>2</sup>**

*Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>1,2</sup>*

E-mail: septidwiwulandari274@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Koordinasi saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan. Jalinan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir Kota Tangerang Selatan memiliki permasalahan seperti masalah ketersediaan jaringan drainase yang belum memadai. Masih tingginya egosektoral organisasi perangkat daerah dalam pemeliharaan saluran drainase penanggulangan banjir. Kurangnya koordinasi dalam pembagian tugas lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini akan menganalisa penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan konsep koordinasi. Hal ini berupaya untuk menjawab permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan mengenai koordinasi dengan 4 indikator yaitu: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian bahwa kesatuan tindakan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola masalah sampah di jaringan drainase dan sungai. Pada pola komunikasi yang dilakukan lintas organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik dengan melakukan komunikasi yang intens. Pada pembagian tugas menunjukkan bahwa kesadaran organisasi perangkat daerah terhadap pekerjaannya belum berjalan dengan baik terbukti bahwa BPBD sebagai koordinator belum mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai daerah tanggap bencana dan Dinas Pekerjaan Umum yang tidak melakukan perawatan rutin jaringan drainase. Pada tingkat disiplin yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah sudah berjalan baik.*

**Kata Kunci:** *Koordinasi, Organisasi Perangkat Daerah, Banjir*

## ABSTRACT

*Coordination currently has a very important role in an organization to be able to achieve productivity, efficiency, and effectiveness, from every activity that needs to be held. The inter-organizational network of regional apparatus in flood management in South Tangerang City has problems such as the problem of inadequate drainage network availability. The high level of ego-sectoral organization of regional apparatus in the maintenance of flood control drainage channels. Lack of coordination in the division of tasks across regional apparatus organizations in flood disaster management. This study will analyze flood control in South Tangerang City using the concept of coordination. It seeks to answer problems in flood disaster management in South Tangerang City. The purpose of this study was to analyze the coordination process across Regional Apparatus Organizations in flood prevention in South Tangerang City. This study uses Hasibuan's theory of coordination with 4 indicators, namely: unity of action, communication, division of labor, discipline. Qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of the research that the unit of action shows that there are still irregularities in the work that is not carried out by the Environmental Service in managing waste problems in the drainage and river networks. In the pattern of communication that is carried out across regional device organizations, it has been going well by conducting intense communication. The division of tasks shows that the awareness of regional apparatus organizations towards their work has not been going well, it is proven that BPBD as coordinator has not socialized to the public about disaster response areas and the Public Works Department does not carry out routine maintenance of drainage networks. At the level of discipline run by the regional apparatus organizations have been going well.*

**Keywords:** *Coordination, Regional Apparatus Organization, Flood*

## PENDAHULUAN

Dari segi geografi, iklim dan jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia potensi yang baik secara ekonomi dan rawan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang

menjadikan Indonesia kaya akan cadangan mineral serta dinamika geologi yang sangat dinamis, sehingga berpotensi terjadinya gempa bumi, tsunami.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada kurun waktu Januari-November 2021 bahwa kejadian bencana alam di Indonesia masih didominasi banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam seperti ulah manusia sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda bahkan kehilangan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada kurun waktu Januari-November 2021 bahwa kejadian bencana alam di Indonesia masih didominasi banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang memiliki beberapa titik daerah yang sering mengalami banjir. Wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki luas sebesar 164,85 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031 dengan jumlah penduduk 1.7 juta jiwa yang tersebar ke 7 Kecamatan, 54 Kelurahan dan memiliki 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar. Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3%, sedangkan ketinggian wilayah antara 0-25 mdpl.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang

menjelaskan bahwa dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan banjir menetapkan diantaranya pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. Kemudian, dipertegas dalam Pada Pergub Nomor 4 Tahun 2020, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Provinsi Banten Untuk Mendukung Pengendalian Banjir Dengan Mengutamakan Kondisi Batas Sungai, Danau dan Waduk; Banjir berulang di beberapa daerah dilakukan melalui perbaikan Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS).

Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/Kota Tangerang Selatan sebesar 59.65% yang masih dari target yang ditetapkan. Sedangkan Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota 402 (ha). Wilayah Kota Tangerang Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan, diantaranya sungai Pesanggrahan, sungai Cisadane dan sungai-sungai lainnya. Dari identifikasi, terdapat 31 titik rawan banjir di wilayah Kota Tangerang Selatan yang perlu mendapat penanganan serius. ANG Selatan diperkirakan akan masih sulit diantisipasi terutama menjelang datangnya musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain belum adanya perencanaan pembangunan perumahan yang tidak terintegrasi dengan tata ruang Kota Tangerang Selatan, buruknya kualitas saluran drainase di 7 ruas jalan, pendangkalan dan penyempitan sungai serta faktor alam yaitu curah hujan, hujan deras serta beberapa sungai di Kota Bogor dan Depok yang berpotensi menimbulkan bencana. Adapun wilayah yang terendam banjir berdasarkan data 2020-November 2021 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 1. Wilayah Terendam Banjir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020- 2021**

No	Tahun	Wilayah Terendam
1.	2020	Kecamatan Setu (3 kali banjir) Kecamatan Serpong (5 kali banjir) Kecamatan Ciputat (5 kali banjir) Kecamatan Pamulang (9 kali banjir) Kecamatan Pondok Aren (8 kali banjir)
2.	2021 per-November	Kecamatan Ciputat (7 kali banjir) Kecamatan Pamulang (2 kali banjir) Kecamatan Pondok Aren (8 kali banjir) Kecamatan Serpong (4 kali banjir) Kecamatan Setu (5 kali banjir)

Sumber: BPBD, 2021

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa wilayah yang terendam banjir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019-2021 Per-November mengalami peningkatan di sebagian wilayah. Melihat upaya penanganan mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan upaya ini belum dapat mencegah terjadinya banjir. Terdapat beberapa penyebab masalah banjir di Kota Tangerang Selatan, pertama karena curah hujan yang tinggi atau situasi alam yang tidak bisa diprediksi sehingga meluapnya beberapa sungai seperti sungai cisadane, kali pesanggrahan, dan kali angke. Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian banjir masih belum memadai dikarenakan Kota Tangerang Selatan memiliki potensi bencana banjir yang tinggi karena Kota Tangerang Selatan dilalui oleh 3 (tiga) aliran sungai, yaitu sungai Cisadane, kali Angke dan kali Cirarab dengan panjang daerah yang dilalui sepanjang 33 kilometer, terutama apabila terjadi curah hujan yang tinggi di daerah Bogor dan Jakarta yang mengalir melalui ketiga aliran sungai tersebut.

Perihal komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang belum berjalan baik berkaitan dengan pola tata ruang yang kurang diperhatikan sehingga penertiban izin belum sesuai dengan regulasi yang ada, kemudian berimplikasi pada pembangunan yang tidak tertata karena adanya beberapa pengembang

besar terutama pengembang perumahan dan mengakibatkan aliran sungai semakin sempit juga lahan penyerapan yang belum siap dalam menampung debit air tinggi sehingga menyebabkan infrastruktur seperti drainase menjadi tertutup.

Dalam penanggulangan banjir tersebut diperlukan pergerakan antisiasi yang bersifat berkelanjutan oleh dinas-dinas terkait, agar hasil dan kinerja dinas terkait dapat berjalan maksimal. Koordinasi diartikan sebagai suatu bentuk penyatuan kegiatan unit-unit kerja antar lembaga atau organisasi sehingga organisasi tersebut dapat bekerja sama dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan untuk melaksanakan tugas guna untuk mencapai tujuan organisasi

Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan banjir seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.

## KAJIAN PUSTAKA

### Koordinasi

Menurut (Hasibuan, 2007) Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) yaitu *men, money, method, materials, machines, dan market* juga pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan, Soewarno Handayaniingrat dikutip (Triyatna, 2012) mengemukakan pelaksanaan koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dalam menyatupadukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Koordinasi adalah proses di mana seorang pemimpin membentuk pola teratur upaya kolektif di antara bawahannya dan memastikan tindakan terpadu dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut (Hasibuan, 2007) faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi ada 4 yaitu:

#### a. Kesatuan Tindakan

Koordinasi dapat dicapai dengan mengambil fokus yang tepat, membuatnya sederhana, menjadikan tindakan sebagai orientasi dan membuat penting sebuah tugas. Untuk mencapainya dibutuhkan kemampuan pemimpin dalam mengatur jadwal dan pembagian waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan sukses dan sesuai dengan rencana.

#### b. Komunikasi

Komunikasi dalam hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi dapat mengkoordinasikan sejumlah unit dalam organisasi berdasarkan rentang adanya komunikasi. Komunikasi dalam hubungan kerja membutuhkan perantara atau fasilitas untuk mendukung berjalannya komunikasi agar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

c. **Pembagian Kerja**  
Prinsip pembagian kerja menyatakan bahwa jika suatu organisasi diharapkan berhasil dan efektif mencapai tujuannya, maka ia harus membagi tenaga kerja. Harapan adanya pembagian kerja agar koordinasi dapat berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

d. **Disiplin**  
Dalam organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi sehingga setiap bagian menghasilkan hasil yang diinginkan. Tidak hanya disiplin waktu dan perilaku kerja, tetapi juga disiplin anggaran, untuk mencapai hasil terbaik dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang tujuannya untuk mengarahkan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas yang terarah pada tujuan organisasi tersebut dengan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

#### **Organisasi Perangkat Daerah**

Menurut (Bernhard Tewal, 2017) Organisasi adalah kumpulan beberapa individu yang secara formal mengatur, mendorong, dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah kumpulan individu yang menggerakkan organisasi dalam

bentuk melakukan berbagai pekerjaan, didukung oleh sistem dan elemen organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi.

PP Nomor 41 Tahun 2007 Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa instansi provinsi adalah unsur pembantu pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan instansi teknis daerah. Badan Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor wilayah, dinas teknis daerah, kecamatan, dan desa.

Kantor Wilayah merupakan Fungsi Inti Pelaksana (Operational Core), melaksanakan tugas dan fungsi Pembantu Kepala Daerah, serta menjalankan fungsi normatif dan manajemen sesuai bidang pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, yang keduanya bersifat wajib dan hal-hal opsional. Untuk itu, Kanwil telah membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung kegiatan teknis operasional dan dukungan teknis di subwilayah.

#### **Banjir**

Banjir menyebabkan aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi

cepat dan bergolak dapat menghanyutkan manusia dan binatang.

Menurut (Kodoatie Robert J, 2002) faktor penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir buatan. Aliran air yang membawa material tanah halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat, yang ... lebih merusak.

Menurut (Ramli, 2010) Penanggulangan bencana dalam kegiatan tanggap darurat berupaya untuk menghadapi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Tergantung pada kondisi dan skala kejadian, penanggulangan bencana memerlukan keterampilan dan pendekatan khusus. Banjir yang terkonsentrasi ini akan dapat merusak fondasi bangunan yang dilaluinya, terutama fondasi jembatan, membuat kerusakan pada bangunan, bahkan dapat merobohkan dan menghanyutkannya. Saat air banjir surut, material yang terbawa oleh air banjir akan terendapkan di tempat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan tanaman, perumahan dan wabah penyakit.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Saryono dalam (Nurdin, 2019) merupakan penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena sangat sesuai digunakan dalam proses pencarian data untuk menjawab permasalahan yang ada dan menunjang kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Nurdin, 2019) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan. reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menggeneralisasi sedalam mungkin berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial dengan mengumpulkan data dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi subyek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, sumber tertulis dari berbagai website pemerintah dan media sosial terkait, serta berita dan

literatur yang mampu mendukung dan melengkapi bahan analisis penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesatuan Tindakan**

Dalam menyatukan tindakan, dibutuhkan pertukaran pikiran antar stakeholders atau dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka untuk berjalan beriringan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Menyatukan tindakan dari banyak pemangku kepentingan tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keputusan saja, tetapi juga untuk menyelaraskan pendapat.

Bentuk dari kesatuan tindakan dalam Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 bagian kesatu pada bab empat mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pembangunan daerah. Dalam upaya penanggulangan banjir pembahasan tersebut dibahas dalam Rapat Wasdal. Bahwa rapat pertemuan untuk kesatuan tindakan tersebut dipimpin oleh Walikota Tangerang Selatan yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah lainnya maupun Camat dari setiap Kecamatan. Rapat Wasdal bersifat tentatif hal ini mengikuti adanya pelaporan dari masyarakat yang sudah sangat mengganggu lingkungan.

Adanya agenda rapat untuk menciptakan integrasi yang menyatukan tindakan-tindakan atau

menjadi suatu kesatuan utuh dari lintas Organisasi Perangkat Daerah penanggulangan banjir sehingga mendapatkan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, dapat berjalan secara terarah di semua tingkatan.

Bahwasanya hasil dari koordinasi dari kesatuan tindakan tersebut terlihat dalam Rapat Wasdal yang memberikan pelaporan terkait banyaknya infrastruktur kurang pemeliharaan dan pemantauan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat menyebabkan bencana banjir secara terus menerus dimusim penghujan yang akan datang. Pemerintah Daerah terkhususnya OPD yang berwenang belum menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta koordinasi yang baik antar satu OPD dengan OPD yang lainnya. Penanggulangan hanya dilakukan pada saat bencana banjir terjadi, namun pasca bencana selesai belum ada tindak lanjut dari OPD untuk mengatasi permasalahannya terjadinya banjir, seperti menormalisasikan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane, Cirarab dan Angke serta dua anak sungai Ledug dan Sabi, juga perbaikan drainase di beberapa titik Jalan Kota Tangerang Selatan.

Maka kesatuan tindakan juga menjadi sarana perumusan dari setiap pelaksanaan kegiatan, hal ini sebagai output dan outcome yang diterapkan

sesuai. Selain itu koordinasi telah menciptakan integrasi dan sinkronisasi agar pencapaian tujuan organisasi diraih efektif dan efisien, sebagai problem solver dari setiap masalah, menyalurkan dan mengsinergikan keberjalanan tugas-tugas yang dimiliki dengan yang bersangkutan.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan komponen penting yang mempengaruhi koordinasi. Keberhasilan sebuah koordinasi ditentukan oleh pola komunikasi, karena seseorang dapat memberi atau menerima informasi sehingga pelaksanaan yang terkoordinasi dapat berjalan dengan lancar melalui komunikasi. Dalam suatu organisasi, komunikasi sangat penting, karena partisipasi komunikasi anggota akan semakin tinggi, dan pemimpin yang menginformasikan tugas kepada anggota harus dibarengi dengan komunikasi dan harus terlaksana secara cermat agar efektif dan tidak menimbulkan tindakan yang saling tumpang tindih dalam penanggulangan bencana. Tertuang dalam pasal 26 UU 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut menyatakan salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

Kesalahan dalam komunikasi antar OPD tidak hanya dapat menimbulkan kesalahpahaman oleh masyarakat dalam menerima

informasi yang diharapkan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tindakan antar instansi, baik antar organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah, maupun antar pusat pemerintah dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat yang berkontribusi dalam penanggulangan bencana.

Komunikasi yang dilakukan ketika bencana banjir terjadi dapat melalui komunikasi personal yaitu menggunakan whatsapp. OPD yang bersangkutan biasanya langsung turun ke lokasi banjir untuk melakukan evakuasi ataupun melakukan menyebarluaskan informasi mengenai kejadian saat pelaksanaan penanggulangan banjir, serta membagi pembagian kerja yang terkoordinir dengan adanya media sosial dalam monitoring pekerjaan penanggulangan sementara dengan membuat tanggul dari karung yang berisi pasir dan mengangkut sampah-sampah yang menyumbat pada saluran drainase. Adapun hambatan dalam pemberian komunikasi ini tak jarang salah satu dari OPD terkait terlambat dalam membantu proses evakuasi efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktivitas dalam tugas-tugas. Maka dari itu, perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-baginya kepada sejumlah unit kerja.

Komunikasi yang berlangsung antar OPD maupun dengan masyarakat maupun membantu penanggulangan sementara karena keadaan yang ada pada musim hujan menyebabkan jalan macet dan banyaknya genangan air yang belum teratasi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pelaporan yang dilakukan masyarakat dalam *platform* Siaran Tansel.

Komunikasi yang antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup dirasa kurang intensif jika melihat dari pelaporan masyarakat yang ada. Koordinasi tidak hanya menciptakan komunikasi hubungan kerja yang baik, tapi juga mampu menyerasikan tujuan bersama. Meskipun adanya hambatan, pelaksanaan koordinasi sangat terbantu dengan adanya media sosial dan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi tersebut dibantu dengan adanya peran media yang berpengaruh dalam proses komunikasi. Melihat koordinasi yang terjalin, media tersebut memberikan kemudahan dalam mencari solusi terkait permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Hal tersebut dilakukan agar setiap perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Koordinasi dilakukan untuk mengontrol setiap unit yang berperan dalam penerapan perencanaan, dalam mengumpulkan dan koordinasi dengan intansi/

lembaga dinas secara horizontal pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam prosesnya, hubungan koordinasi yang terjalin dimaksudkan untuk mengatur pembagian kerja dari semua pihak yang bersangkutan sehingga terjadi kesatuan tindakan. Koordinasi melalui pembagian kerja juga membentuk koordinasi antar departemen dan unit kerja dalam suatu organisasi koordinasi. Dengan adanya koordinator, jika terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik oleh koordinator atau unit organisasi.

Dalam penanggulangan bencana dibutuhkan seorang koordinator untuk mengefektifkan penanggulangan bencana di daerah, melalui Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten. BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah memiliki tugas untuk diantaranya siapsiaga dalam pencegahan kebencanaan, menyiapkan kedaruratan dan logistik bila terjadi bencana, serta melakukan rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana. Dalam penanggulangan bencana, BPBD dibantu oleh banyak Organisasi Perangkat Daerah di berbagai sector diantaranya sector pemerintahan, sector kesehatan, sector sosial, sector pekerjaan umum, sector energi dan

sumber daya air, dan sektor lingkungan hidup.

### **Pembagian Kerja**

Pembagian kerja dalam pekerjaan sangat untuk kenaikan. Secara teknis ketika terjadi bencana, koordinasi dalam pembagian tugas lintas Organisasi Perangkat Daerah dapat dikatakan baik, karena dari OPD tersebut melakukan koordinasi sesuai arahan dari koordinator yaitu BPBD. Dalam keadaan bencana, semua OPD melakukan *jobdesk* nya masing-masing, dimulai dari BPBD yang melakukan evakuasi terhadap korban, Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pengerukan sampah di saluran-saluran, dan Dinas Pekerjaan Umum yang membuat tanggul sementara dalam penanggulangan banjir. BPBD selaku koordinator pelaksanaan penanggulangan banjir mengkoordinasikan setiap unit harus bekerja secara terkoordinir, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Koordinasi antar instansi penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan saat ini menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain: Pertama, belum adanya sinergitas dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif dalam proses penanggulangan bahaya banjir di Kota Tangerang yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bersama OPD/Badan, Kota Tangerang Selatan tidak dapat

mencapai tujuan pengendalian banjir. Kedua, tidak adanya pembagian kerja antar OPD, dan koordinasi tidak dapat berjalan normal, yang terjadi pada tahap pencegahan potensi bencana, yaitu dalam kegiatan mitigasi bencana seperti kegiatan pengerukan, pengendapan tanah, dan pembuangan limbah. Pengerukan, normalisasi DAS, pengelolaan sumber daya air, restorasi drainase atau pembangunan tanggul. Ketiga, komunikasi yang dilakukan oleh Koordinator belum berjalan dengan baik terutama dalam kegiatan penanggulangan bencana pada proses pemulihan/rehabilitasi. Masih adanya permasalahan dalam pemulihan dampak lingkungan dan infrastruktur.

Bahwa koordinasi dengan pembagian tugas menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan banjir. Setiap permasalahan dibahas dalam sebuah pertemuan untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan dirumuskannya solusi yang akan diterapkan. Setiap solusi yang diusulkan disepakati oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah menjadi kesepakatan Bersama sebagai upaya penanggulangan banjir. Pentingnya peran koordinator sebagai pengambil keputusan dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah penata melahirkan jaringan hubungan kerja/komunikasi yang dapat menjaga kegiatan sesuai dengan tujuan.

### **Disiplin**

Disiplin dalam penanggulangan bencana berarti bahwa organisasi

perangkat daerah terkait dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Organisasi perangkat daerah yang terlibat melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, seperti BPBD dalam mitigasi bencana, Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pemeliharaan drainase, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

Disiplin diperlukan untuk mengatur perilaku antar organisasi, yang masing-masing harus mengendalikan dorongannya masuk atau solusi dapat membantu lintas OPD tersebut.

Disiplin dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dapat diketahui dari intensitas lintas Organisasi Perangkat Daerah terkait mengikuti rapat yang diadakan setiap bulannya dalam rangka menyelesaikan pelaporan-pelaporan dari masyarakat melalui Siaran Tangsel ataupun rapat membahas program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam penanggulangan banjir melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah penerapan disiplin tercermin pada ketaatan terhadap tupoksi yang ada di peraturan-peraturan melalui kesadaran terhadap lintas Organisasi Perangkat Daerah, terlihat dalam setiap penanggulangan banjir selalu mengerahkan OPD lainnya untuk turun ke lokasi banjir. BPBD bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan

penanggulangan banjir, sehingga pelaksanaan penanggulangan banjir mendapatkan *output* dan *outcome*.

Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam penanggulangan banjir tersebut dibahas dalam Rapat Wasdal sebagai fasilitator koordinasi. Saat ini permasalahan dari adanya banjir di dominasi oleh saluran drainase yang kurang diperhatikan, Daerah Aliran Sungai yang tidak dilakukan normalisasi, dan beberapa titik program TPS3R yang tidak aktif.

Secara teknis disiplin yang dilakukan oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan ketaatan masing-masing OPD tersebut dalam menjalankan tugas untuk penanggulangan bencana banjir. BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana banjir berperan aktif untuk mengerahkan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk turut serta terjun ke lokasi terjadinya bencana. Mengingat banjir disebabkan oleh banyak faktor, maka disini lah peran lintas OPD untuk membantu penanggulangan banjir.

Peran serta OPD dalam tanggap bencana merupakan bagian terpenting untuk menyelamatkan masyarakat. BPBD sebagai koordinator merupakan pusat perhatian dari OPD lainnya. BPBD menjalankan tugasnya ketika mendapat pelaporan dari masyarakat mengenai titik lokasi yang mengalami banjir.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya koordinasi dalam kesatuan tindakan bersifat tentatif, hal ini mengikuti adanya pelaporan dari masyarakat dan dari adanya kebencanaan darurat yang terjadi. Masih kurangnya inisiatif dari masing-masing OPD dalam penanggulangan banjir di beberapa faktor seperti belum menormalisasikan Daerah Aliran Sungai Cisadane dan Cirarab, kurang memperhatikan perawatan/pemeliharaan maupun perbaikan saluran drainase di titik jalan Kota Tangerang Selatan, dan kurangnya sosialisasi dari masing-masing OPD terkait permasalahan tanggap kebencanaan.

Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi yaitu dengan mengadakan rapat formal melalui *zoom meetings* dan informal lewat telepon dan *group* obrolan di media penanggulangan banjir. Dinas Pekerjaan Umum membantu pada bidang pemeliharaan infrastruktur seperti drainase dan normalisasi daerah aliran sungai serta pengerukan sedimentasi tanah maupun sampah.

Dinas Pekerjaan Umum sudah melaksanakan konsep disiplin dengan hadir tepat waktu membantu ketika terjadi bencana serta melakukan tugas sesuai wewenangnya.

Masyarakat dapat menggunakan fasilitas nomor telepon OPD terkait melalui media sosial dan dapat

melakukan pengaduan berupa memberikan kritik maupun saran melalui platform Siaran Tangsel kepada OPD yang bersangkutan. Komunikasi dalam hubungan kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah ketika penanggulangan banjir sudah terjalin dengan baik.

Bentuk pembagian kerja yang dilakukan oleh organisasi lintas departemen belum mencapai kejelasan dan pemahaman uraian tugas, karena masih terdapat tumpang tindih kepentingan atau kerugian yang harus dibuka dan perlu diperbaiki.

Koordinasi kedisiplinan mengenai tugas, pokok dan fungsi dalam menjalankan kepada seseorang atau anggota organisasi yang dikelola oleh pimpinan yang dalam hal ini disebut dengan ketua koordinator yaitu BPBD Kota Tangerang Selatan. Selaku koordinator BPBD menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan Bantuan yang diberikan oleh BPBD biasanya terkait perahu karet untuk membantu mengevakuasi korban banjir.

Bahwa koordinasi yang dilakukan mengenai disiplin penanggulangan banjir sudah dikoordinasikan dengan baik oleh BPBD selaku koordinator serta lintas OPD lainnya.

Koordinasi kedisiplinan mengenai tugas, pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya dan ketanggapannya tertera dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan. Namun dalam pelaksanaannya

masih ada ketidaktaatan masyarakat khususnya mengenai kebersihan maupun kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan yang bersih harus di dukung oleh pemeliharaan dan pemeriksaan yang rutin.

tugasnya dan ketanggapannya tertera dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan.

Namun dalam pelaksanaannya masih ada ketidaktaatan masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungannya. Disiplin yang dilakukan oleh tugas OPD khususnya tugas BPBD sebagai koordinator belum maksimal karena masih adanya tugas yang belum terlaksana untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Koordinasi dalam kedisiplinan penanggulangan banjir mampu mengintegrasikan lintas Organisasi Perangkat Daerah. BPBD yang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Dalam pelaksanaan teknisnya Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas masyarakat bagaimana menjadi daerah yang tanggap bencana.

Koordinasi melalui penerapan disiplin dalam penanggulangan banjir diterapkan sesuai dari arahan koordinator dalam penanggulangan banjir. BPBD juga dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam dengan kehadiran masing-masing OPD di lokasi terjadinya bencana dan ketepatan hadir dalam rapat formal.

Koordinasi kedisiplinan mengenai tugas, pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya dan ketanggapannya tertera dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan sudah berjalan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bernhard Tewal, A. M. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Patra Media.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie Robert J, S. (2002). *Banjir Beberapa Penyebab dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.
- Ramli, S. (2010). *Manajemen Bencana*. PT Dian Rakyat.
- S, R. (2010). *Manajemen Bencana*. PT Dian Rakyat.
- Triyatna, T. (2012). Pelaksanaan Koordinasi Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Penyusunan Program Pembangunan Di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara.*, 1-31
- Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015

- |   |  |
|---|--|
| Tentang Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana<br>Bantuan Keuangan Provinsi<br>Banten. Banten.<br>Pemerintah Indonesia. 2007. PP No 41<br>tahun 2007 tentang Organisasi<br>Perangkat Daerah. Indonesia.<br>Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-<br>Undang Nomor 24 Tahun 2007 | Tentang Penanggulangan<br>Bencana. Indonesia<br>Peraturan Daerah Gubernur Banten.<br>2020. Peraturan Gubernur Banten<br>Nomor 4 Tahun 2020 Tentang<br>Petunjuk Teknis Pengelolaan. |
|---|--|